

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENDORONG
PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN
DESA DI DESA SEMUNAI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Juwita Sihombing
NPM. 157110679

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat terkait Pembangunan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018”** dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan usulan penelitian ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Lutfi, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si. selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si Pembimbing II saya yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya didalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Pekanbaru, 15 Juli 2020
Penulis

Juwita Sihombing
NPM. 157110679

DAFTAR ISI

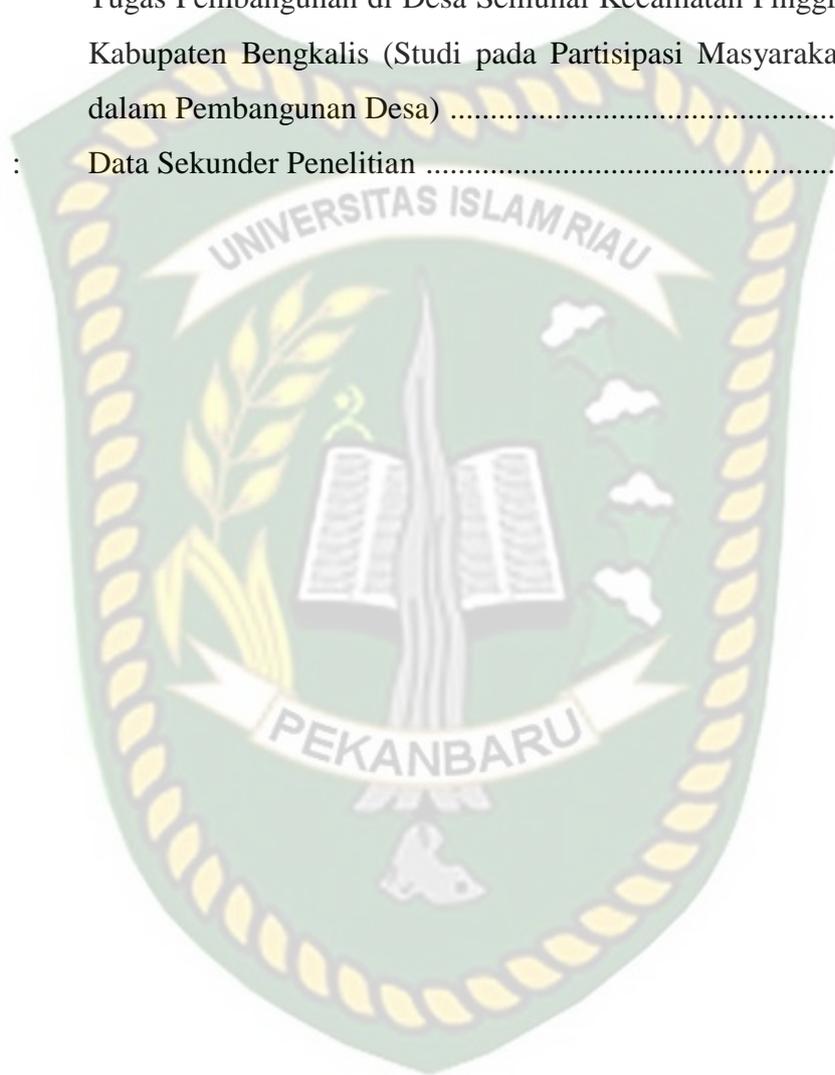
	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERENSI SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	9
1. Konsep Administrasi Publik	9
2. Konsep Organisasi	10
3. Konsep Desa	11
4. Peranan Kepala Desa	13
a. Konsep Peranan	13
b. Konsep Peranan Kepala Desa	14
5. Konsep Partisipasi	15
B. Kerangka Pikir	18

C. Konsep Operasional	19
D. Operasional Variabel	20
E. Teknik Pengukuran	22
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel	28
D. Teknik Penarikan Sampel	28
E. Jenis dan Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisis Data	31
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	32
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Bengkalis	33
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Bengkalis	33
2. Geografis Kabupaten Bengkalis	34
3. Demografis Kabupaten Bengkalis	36
B. Kecamatan Pinggir	37
C. Desa Semunai	40
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	65
BAB VI: PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Data Pembangunan yang ada di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	4
II.1	: Operasional Variabel Penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa) ...	20
III.1	: Populasi dan Sampel Penelitian	28
III.2	: Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan tugas Pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa)	32
IV.1	: Daftar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017	35
IV.2	: Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinggir pada Tahun 2017	37
IV.3	: Daftar Susunan Pemerintah Desa di Desa Semunai pada Tahun 2018	40
IV.4	: Daftar Susunan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Semunai pada Tahun 2018	41
IV.5	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Semunai Tahun 2018	42
IV.6	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya di Desa Semunai Tahun 2018	44
V.1	: Jawaban Responden terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan	46
V.2	: Jawaban Responden terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pendidikan	52

V.3	:	Jawaban Responden terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan	58
V.4	:	Rekapitulasi Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa)	63
V.5	:	Data Sekunder Penelitian	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kepala Desa	75
2	: Daftar Wawancara Penelitian Kepada Lembaga Kemasyarakatan (LKD)	80
3	: Daftar Pertanyaan Kuesioner / Angket Penelitian	86
4	: Daftar Data Sekunder	101
5	: Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	105
6	: Dokumentasi Penelitian	106

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Juwita Sihombing
NPM : 157110679
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Terkait Pembangunan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan;

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasanya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 21 April 2020
Pelaku Pernyataan,

Juwita Sihombing

**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN DESA DI DESA SEMUNAI
KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018**

Juwita Sihombing
NPM. 157110679

Abstrak

Kata Kunci : Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016. Variabel penelitian adalah Peranan, yaitu peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Informan dalam penelitian ini adalah satu orang Kepala Desa dan satu orang perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan (LKD), sedangkan responden penelitian adalah 43 orang masyarakat Desa Semunai. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan kuesioner, dimana hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 adalah cukup berperan. Bentuk peranan Kepala Desa berupa adanya pemberian informasi kepada masyarakat terkait pembangunan desa, adanya pembinaan berupa penyuluhan agar masyarakat termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, dan adanya upaya instruksi kepada jajarannya agar masyarakat terlibat atau berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan desa, baik itu berupa partisipasi uang, harta benda, tenaga, atau keterampilan dalam pembangunan desa.

**THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN ENCOURAGING
COMMUNITY PARTICIPATION RELATED TO VILLAGE
DEVELOPMENT IN SEMUNAI VILLAGE PINGGIR DISTRICT
BENGKALIS REGENCY IN 2018**

Juwita Sihombing
NPM. 157110679

Abstract

Keywords : The role of the village head in encouraging community participation, village development

This study aims to determine the role of the Village Head in encouraging community participation related to village development in Semunai Village, Pinggir District, Bengkalis Regency in 2016. The research variable is the Role, namely the role of the Village Head in encouraging community participation related to village development. This type of research is qualitative and quantitative research with descriptive methods. The location of this research is Semunai Village, Pinggir District, Bengkalis Regency. The informants in this study were one Village Head and one representative from the Community Institution (LKD), while the research respondents were 43 people from Semunai Village. The data of this study were sourced from primary data obtained through interviews and questionnaires, where the results of this study were analyzed descriptively. Based on the research results, it is known that the role of the Village Head in encouraging community participation related to village development in Semunai Village, Pinggir Subdistrict, Bengkalis Regency in 2016 is quite a role. The form of the role of the Village Head is in the form of providing information to the community related to village development, there is guidance in the form of counseling so that the community is motivated to participate in village development, and there is an effort to instruct the ranks so that the community is directly involved in or participates in village development, whether in the form of money participation, property, energy or skills in village development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya desentralisasi di Indonesia, maka setiap daerah yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia menjadi daerah otonom. Sebagaimana Pasal 1 Poin (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.” Dimana dalam Pasal 1 Poin (12) disebutkan bahwa “Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Melalui undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa wilayah Desa juga memiliki kewenangan yang sama dengan wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan yang ada di Indonesia, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya masing-masing. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Lebih lanjut dalam Pasal 4 poin (d), bahwa “Pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.”

Desa adalah wilayah yang berkekuatan hukum, dan memiliki wewenang serta hak-hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya desa memiliki tujuan yang jelas dalam pengaturannya. Dimana salah satu alasan pengaturan desa adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat desa, guna mencapai kesejahteraan. Tentunya partisipasi masyarakat dapat didorong dengan adanya peranan Pemerintah Desa atau Kepala Desa.

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau disebut dengan nama lain.” Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, bahwa “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis No. 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis, bahwa

“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2),

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, bahwa peran Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terdapat pada tugas pembinaan masyarakat. Dimana fungsi Kepala Desa dalam pembinaan masyarakat meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Jadi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk ke dalam peran Kepala Desa. Artinya, Kepala Desa berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Dengan demikian, Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis juga berperan dalam mendorong partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan di wilayah desanya. Berikut data pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Tabel I.1 Data Pembangunan yang ada di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No.	Jenis Pembangunan	Bentuk Pembangunan
1	Pembangunan Infrastruktur Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Semenisasi Jalan Mata Air 2) Semenisasi Jalan Baru 3) Semenisasi Jalan KH Nazaruddin 4) Semenisasi Jalan As Jaya Makmur 5) Semenisasi Jalan KH Nazaruddin I 6) Semenisasi Jalan KH Nazaruddin II 7) Semenisasi Jalan Sako Dusun III 8) Semenisasi Jalan Beo 9) Semenisasi Jalan Melati 10) Semenisasi Jalan Samping 11) Pembuatan Parit Beton Jalan KH Nazaruddin 12) Pembuatan Parit Beton Jalan Beo 13) Pembuatan Parit Beton Jalan Batin Tomat 14) Pembuatan Galian Parit dan Parit Beton Jalan Samping 15) Pemasangan Boxculver Jalan Melati 16) Pemasangan Boxculver Jalan Dusun Air Hitam 17) Pemasangan Boxculver Jalan Aek Nabara 18) Pembuatan Turap Jalan Anggrek
2	Pembangunan Gedung Fasilitas Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan Gedung Perpustakaan 2) Pembuatan Gedung Posyandu Mekar Air Hitam 3) Pembuatan Gedung Posyandu Melati Air Hitam 4) Pembuatan Gedung Posyandu Menanti
3	Pembangunan Fasilitas Desa dan Kantor Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembuatan Tower dan Pengadaan Sumur Bor 2) Pembuatan Pagar Kuburan RT 02 / RW 01 3) Pembuatan Tugu Pembatas Desa 4) Pembangunan 5 Unit Sumur Bor 5) Pembuatan Pagar Kantor Desa 6) Pembangunan Parit Kantor Desa 7) Pembuatan Parkir dan Kanopi Kantor Desa 8) Rehap WC dan Kamar Mandi Kantor Desa

Sumber: *RPJM Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, 2019*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka banyak bentuk pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 yang dapat

dilakukan melalui partisipasi masyarakatnya. Menurut Pasal 1 Poin (41) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Dengan adanya partisipasi, maka masyarakat telah berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk partisipasi adalah menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan. Selain itu, partisipasi memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia dan memudahkan pekerjaan pemerintahan desa, terutama dalam hal pembangunan desa. Tentunya partisipasi masyarakat dapat meringankan beban kerja, biaya, dan waktu pekerjaan dalam penyelesaian suatu pembangunan yang ada di desa.

Adanya aspirasi masyarakat dapat timbul karena adanya dorongan pada setiap individu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat tertentu. Tentunya dorongan tersebut timbul karena ada kebutuhan yang mendesak. Tetapi tidak ada jaminan dapat terserapnya seluruh aspirasi masyarakat di Desa. Sehingga seiring waktu semakin banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, dibutuhkan peranan aktif Kepala Desa untuk mendorong setiap masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga partisipasi dapat disampaikan melalui berbagai aspirasi, pemikiran, dan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat.

Sebenarnya, Lembaga Kemasyarakatan dapat menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu wadah

bagi masyarakat untuk berpartisipasi, baik itu dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.”

Berdasarkan permasalahan terkait aspirasi masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, ditemui beberapa fenomena berikut:

- 1) Terindikasi kurangnya partisipasi masyarakat Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 terkait partisipasi pembangunan desa. Hal tersebut diketahui minimnya aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan Musrenbangdes pada Tahun 2018. Penyebabnya karena banyak aspirasi masyarakat yang tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa dalam pembahasan Musrenbangdes Tahun 2018.
- 2) Terindikasi masih kurang optimalnya peran Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan di Desa. Padahal partisipasi tidak hanya menyampaikan aspirasi dalam kegiatan Musrenbangdes saja, tetapi dapat dilakukan melalui swadaya masyarakat dan melalui bantuan dana desa.
- 3) Terindikasi Lemabaga Kemasyarakatan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak berfungsi secara optimal dalam

menghimpun aspirasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan penelitian tersebut di atas, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka penulis tertarik meneliti tentang **“Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat terkait Pembangunan Desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian, maka dapat rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir, serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusinya.
- 2) Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu terkait administrasi publik.

b. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai:

- 1) Bahan referensi bagi pihak peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- 2) Bahan masukan terkait peranan Kepala Desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

c. Secara Akademik

Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya di FISIPOL Universitas Islam Riau khususnya tentang peran Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi Publik

Menurut Keban (2008:4), bahwa “Administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.”

Herbert Simon dalam Pasolong telah membagi empat prinsip administrasi, yaitu:

- a. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok
- b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
- c. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
- d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat (Simon dalam Pasolong, 2011:14)

2. Konsep Organisasi

Dimock dalam Tangkilisan (2005:132) mengatakan bahwa “Organisasi sebagai suatu cara yang sistematis untuk memadukan bagian-bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh dimana kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Menurut pendapat Oliver Sheldon dalam Sutarto (1991:22), organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan saluran yang terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Sedangkan Robbins (2015:12) mengatakan organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Terdapat tiga unsur penting partisipasi dalam organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Unsur kedua, kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.

- c. Unsur ketiga, unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota artinya ada rasa *sense of belongingness* (Davis, 1996:114).

3. Konsep Desa

Menurut Rauf & Maulidiah (2015:19), bahwa “Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintah desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintah Desa dinyatakan, yakni: Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Lebih lanjut Rauf & Maulidiah (2015:19) mengatakan bahwa “Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintah desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni:

- 1) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah
- 2) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat
- 3) Pemerintah desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (3), bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa. Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa tersebut, maka terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 2) Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
- 3) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
- 4) Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintah desa” (Rauf & Maulidiah, 2015:20)

Meurut Wasistiono dan Tahir dalam Rauf & Maulidiah (2015:21) bahwa “Pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya bersifat mendua (*ambivalen*), yaitu bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.”

4. Peranan Kepala Desa

a. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan Sarwono (2015:215) mengatakan bahwa “Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah ‘peran’ yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.”

Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara- cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan peran, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari peran. Dengan demikian, seorang aktor bebas untuk menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari peran yang diharapkan darinya (Sarwono, 2015:215).

Peran erat kaitannya dengan status atau kedudukan seseorang, misalnya kedudukan Kepala Desa dan RT tentu berbeda, dan tentu perannya juga dapat berbeda karena kedudukannya. Menurut Linton (1984:268), tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung.

b. Konsep Peranan Kepala Desa

Konsep peranan Kepala Desa di atur Peraturan Bupati Bengkalis No. 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis. Disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (2) bahwa: “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

5. Konsep Partisipasi

Menurut Mardikanto (2013:167), partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan di sini atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Sastropetro (2011:1), partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut Hami Juyo, terdapat beberapa bentuk partisipasi yang nyata, yaitu:

1. Partisipasi uang adalah partisipasi untuk memperlancar usaha usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
4. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya (Joyo, 2009:4)

Menurut Angell (2009:6), banyak faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang darikelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik, selain itu laki-laki sangat berperan penting dalam kehidupan keluarga karena sebagai kepala rumah tangga yang memegang peranan penting untuk mengatur keluarga serta sebagai pemimpin dalam suatu kelompok sosial masyarakat (kepada adat, pemimpin upacara adat dan lain sebagainya)

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

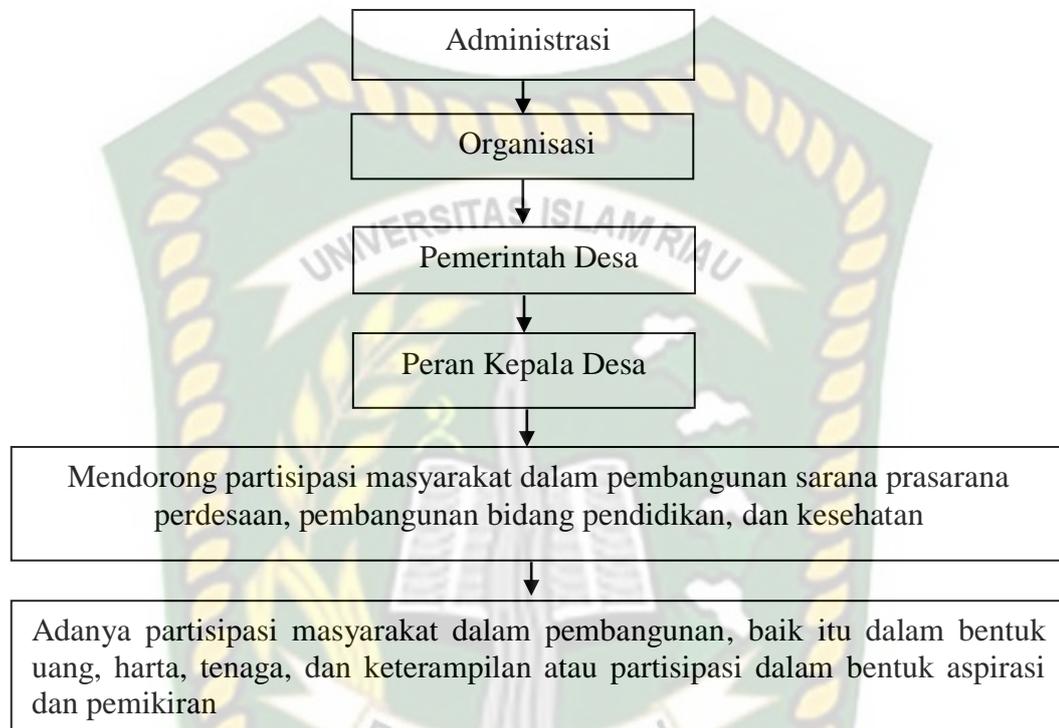
5. Lamanya Tinggal dan Pengalaman Berinteraksi dengan Lingkungan

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian Administrasi tentang peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ini dibuat dalam bentuk gambar berikut.

Gambar II.1. Kerangka Pikir tentang Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa)



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

C. Konsep Operasional

Konsep yang perlu dioperasionalkan terkait permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas atau fungsi Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa.
- 2) Mendorong partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha memotivasi atau menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di desa.

- 3) Pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membangun sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
- 4) Aspirasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan masyarakat terkait pembangunan di desa.
- 5) Pemikiran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumbangan berbentuk pikiran yang diberikan oleh masyarakat dan bermanfaat untuk pembangunan desa.

D. Operasional Variabel

Variabel peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan desa adalah sebagai berikut.

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa)

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Penilaian
1	2	3	4	5
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243)	Peranan Kepala Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat terkait Pembangunan Desa	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan	a. Adanya informasi terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan kepada masyarakat b. Adanya pembinaan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terkait	a. Berperan b. Cukup Berperan c. Kurang Berperan

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Penilaian
1	2	3	4	5
			<p>pembangunan sarana prasarana perdesaan</p> <p>c. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana</p>	
		2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan	<p>a. Adanya informasi terkait pembangunan bidang pendidikan kepada masyarakat</p> <p>b. Adanya pembinaan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang pendidikan</p> <p>c. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan</p>	<p>a. Berperan</p> <p>b. Cukup Berperan</p> <p>c. Kurang Berperan</p>
		3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan	<p>a. Adanya informasi terkait pembangunan bidang kesehatan kepada masyarakat</p> <p>b. Adanya pembinaan yang dapat mendorong partisipasi</p>	<p>a. Berperan</p> <p>b. Cukup Berperan</p> <p>c. Kurang Berperan</p>

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Penilaian
1	2	3	4	5
			masyarakat terkait pembangunan bidang kesehatan c. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklarifikasikan menjadi tiga kategori yaitu berperan, cukup berperan dan kurang berperan. Setiap kategori memiliki rentang skor yang berbeda-beda, untuk memperoleh rentang skor pada setiap kategori, maka perlu dicari terlebih dahulu skor tertinggi dan terendahnya.

Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Range = Skor Tertinggi – Skor Terendah

$$Interval = \frac{Range}{Banyak Kategori}$$

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Total Skor Tertinggi = 3 x 45 x 43 = 5.805

Total Skor Terendah = 1 x 45 x 43 = 1.935

$$Interval = \frac{5.805 - 1.935}{3}$$

Interval = 1.290

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Berperan : Kepala Desa berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 4.515 – 5.805

Cukup Berperan : Kepala Desa dikatakan cukup berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 3.225 – 4.514

Kurang Berperan : Kepala Desa dikatakan kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 1.935 – 3.224

Sementara itu ukuran klasifikasi interval skor untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan

Total Skor Tertinggi = $3 \times 15 \times 43 = 1.935$

Total Skor Terendah = $1 \times 15 \times 43 = 645$

$$Interval = \frac{1.935 - 645}{3}$$

$$Interval = 430$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Berperan : Kepala Desa dikatakan berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 1.505 – 1.935

Cukup Berperan : Kepala Desa dikatakan cukup berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 1.075 – 1.504

Kurang Berperan : Kepala Desa dikatakan kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 645 – 1.074

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pendidikan

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 15 \times 43 = 1.935$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 15 \times 43 = 645$$

$$Interval = \frac{1.935 - 645}{3}$$

$$Interval = 430$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Berperan : Kepala Desa dikatakan berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 1.505 – 1.935

Cukup Berperan : Kepala Desa dikatakan cukup berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 1.075 – 1.504

Kurang Berperan : Kepala Desa dikatakan kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 645 – 1.074

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 15 \times 43 = 1.935$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 15 \times 43 = 645$$

$$\text{Interval} = \frac{1.935 - 645}{3}$$

$$\text{Interval} = 430$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa

Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Berperan : Kepala Desa dikatakan berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 1.505 – 1.935
- Cukup Berperan : Kepala Desa dikatakan cukup berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 1.075 – 1.504
- Kurang Berperan : Kepala Desa dikatakan kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 jika skor berada pada interval 645 – 1.074

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut pendapat Moleong (2011:6), adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2015:23), data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (*scoring*). Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot. Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono (2015:21) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian

yang dijumpai, yaitu diduga belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

C. Populasi dan Sampel

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Subjek	Populasi	Sampel	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	2	2	100%
3	Masyarakat	1.701	43	2,5%
	Jumlah	1.704	46	

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian menggunakan teknik sensus dan teknik aksidental. Teknik sensus digunakan untuk Kepala Desa dan LKD, dan teknik sampel aksidental untuk masyarakat yang jumlahnya 2,5% dari 1.701 kepala keluarga. Dilakukan secara aksidental untuk memudahkan penelitian ini, sehingga yang dijadikan sampel adalah masyarakat Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang mudah ditemui dan bersedia menjadi sampel penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer atau data utama/pokok penelitian, yaitu berupa data hasil wawancara dan hasil jawaban kuesioner terkait peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung penelitian ini berupa profil, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dan dokumentasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Menurut Hadi dalam Sugiyono (2012:166), “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang diamati dalam penelitian ini adalah peranan Kepala Desa yang dapat

dilihat dalam bentuk perilaku atau proses kerja terkait peranan, serta perilaku masyarakat terkait partisipasinya dalam pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara

Jenis wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2012:233) terdapat beberapa macam, yaitu: (1) *wawancara terstruktur* (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan); (2) *wawancara semiterstruktur* (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemmasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya); dan (3) *wawancara tidak terstruktur* (merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur terkait peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

3. Dokumentasi

Menurut pendapat Sugiyono (2012:240), “Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.” Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Pemerintah Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yaitu data mengenai profil atau

sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsinya, serta dokumentasi penelitian.

4. Kuesioner

Kuesioner berbentuk lembaran pertanyaan yang telah ditentukan pilihan jawabannya, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Lembaran kuesioner diberikan kepada responden penelitian, yaitu masyarakat Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

5. Kepustakaan

Kepustakaan di sini berupa data-data, teori, referensi, dan artikel yang berasal dari buku, jurnal dan panduan lainnya yang berguna sebagai pedoman atau rujukan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini secara objektif.

G. Teknik Analisis Data

Data didapatkan dari jawaban wawancara dan jawaban kuesioner responden terkait peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018. Setiap hasil wawancara dan kuesioner dianalisis dengan cara mendeskripsikannya sesuai teori relevan untuk ditarik kesimpulannya berdasarkan tujuan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Bengkalis

Dahulu daerah Bengkalis adalah daerah pertemuan para pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab, Palembang, Jambi, Inderagiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Siam, Kamboja, Kocin, China, dan pedagang-pedagang dari Minangkabau. Disamping menjual berbagai kebutuhan dan barang dagangan, para pedagang tersebut juga membeli beberapa komoditi atau kebutuhan di daerah Bengkalis, yaitu garam, beras, dan juga ikan terubuk.

Pemerintah yang menguasai daerah Bengkalis pada masa itu, atau pada tahun 1717 Kerajaan Buntan yang dipimpin oleh Raja Kecil. Namun kerajaan tersebut berubah nama menjadi Kerajaan Siak pada tahun 1723. Setelah berdirinya Kerajaan Siak, maka daerah Bengkalis dan Bukit Batu dijadikan pos terdepan dalam rangka pertahanan yang dipimpin oleh Datuk Laksamana Raja Dilaut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membangun armada yang kuat, serta kapal-kapal perang yang dilengkapi dengan persenjataan yang didatangkan dari negara-negara Islam.

Kemudian setelah Bengkalis berada dalam kekuasaan Belanda, maka daerah Bengkalis dijadikan ibukota Keresidenan Sumatera Timur. Namun, hal itu tidak bertahan lama, karena Belanda memindahkan ibukota keresidenan dari Bengkalis ke Medan. Sedangkan Bengkalis dijadikan

ibukota Afdeling Bengkalis hingga akhir kekuasaan Belanda di Indonesia. Sedangkan saat pendudukan Jepang, Bengkalis dijadikan ibukota Bengkalis Bun.

Awal berdirinya Kabupaten Bengkalis karena disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, dimana disebutkan bahwa Bengkalis adalah salah satu Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Pada tahun 1999, Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai, dan pada Tahun 2000 terjadi kembali pemekaran dimana Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada awal tahun 2009, Kabupaten Bengkalis mekar kembali menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Saat ini, Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Bupati bernama Amril Mukminin.

2. Geografis Kabupaten Bengkalis

Secara geografis, daerah Kabupaten Bengkalis terletak antara $2^{\circ}7'37,2''$ – $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}57'57,6''$ – $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur. Kemudian Kabupaten Bengkalis berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut ini:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti

- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai, yang paling penting adalah Sungai Siak dan Sungai Mandau. Dimana Sungai Siak memiliki panjang 300 km, dan Sungai Siak Kecil adalah 90 km, dan Sungai Mandau 87 km. Sungai-sungai tersebut menjadi sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk.

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 7.773,93 km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Dimana terdapat 17 pulau utama, dan banyak pulau-pulau kecil. Semua wilayah tersebut dibagi ke dalam 11 wilayah kecamatan, yaitu sebagai berikut.

Tabel IV.1 Daftar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Mandau	937,47	12,06%
2	Pinggir	2.503,00	32,20%
3	Bathin Solapan	-	-
4	Talang Muandau	-	-
5	Bukit Batu	1.128,00	14,51%
6	Siak Kecil	742,21	9,55%
7	Bandar Laksamana	-	-
8	Rupat	896,35	11,53%
9	Rupat Utara	628,50	8,08%
10	Bengkalis	514,00	6,61%

11	Bantan	424,40	5,46%
	Jumlah (%)	7.773,93	100,00%

Berdasarkan tabel IV.1, bahwa Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bengkalis, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bantan. Sedangkan tiga kecamatan lainnya (Bathin Solapan, Talang Mandau, dan Bandar Laksamana) belum diketahui, karena baru dimekarkan pada Tahun 2017.

3. Demografis Kabupaten Bengkalis

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2017 adalah 559.081 jiwa yang terdiri dari 286.865 orang adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 272.216 orang lainnya adalah penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Bengkalis mengalami pertumbuhan sebesar 1,01% pada tahun 2017, dimana pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,01%, dan penduduk perempuan juga sebesar 1,01%.

Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2017 mencapai 72 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 4 orang. Kepadatan penduduk setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis adalah beragam. Dimana wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mandau, dengan kepadatan 263 jiwa/km². Sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk

terendah, adalah Kecamatan Rupat Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 23 jiwa/km².

Total jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis yang berada pada garis kemiskinan untuk tahun 2017 adalah 496.657 jiwa. Penduduk dengan status miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 sebanyak 38.000 jiwa atau 6,85%, dari total penduduk atau naik dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 37.000 jiwa atau 6,82% dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kemudian jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2017 adalah 10.858 bayi. Sedangkan jumlah kematian yang terdata pada tahun 2017 di Kabupaten Bengkalis adalah 206 orang.

B. Kecamatan Pinggir

Kecamatan Pinggir adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Luas wilayahnya adalah 1.063,09 km² yang terbagi pada 10 (sepuluh) wilayah desa/kelurahan. Lebih jelasnya pembagian wilayah dan luas wilayah Kecamatan Pinggir berdasarkan desa/kelurahan adalah sebagai berikut.

Tabel IV.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pinggir pada Tahun 2017

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Pinggir	99,25	9,34%
2	Semunai	220	20,69%
3	Tengganau	260	24,46%
4	Balai Pungut	6	0,56%
5	Muara Basung	87,41	8,22%

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
6	Titan Antui	28	2,63%
7	Balai Raja	7,20	0,68%
8	Sungai Meranti	157,23	14,79%
9	Pangkalan Libut	180	16,93%
10	Buluh Apo	18	1,69%
	Total Luas (%)	1.063,09	100,00%

Seluruh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Pinggir terletak di wilayah dataran dengan topografi datar. Dari sepuluh desa/kelurahan, hanya 2 yang berstatus sebagai kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Raja dan Kelurahan Sungai Meranti, dan 8 lainnya berstatus sebagai desa tetapi desa yang definitif.

Jumlah penduduk Kecamatan Pinggir pada tahun 2017 adalah 89.157 jiwa, terdiri dari 45.800 laki-laki, dan 43.357 adalah perempuan. Untuk menunjang berbagai kebutuhan penduduknya, Kecamatan Pinggir memiliki berbagai sarana fasilitas, baik itu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana ibadah.

Fasilitas pendidikan ada 90 sekolah, yang terdiri dari 29 sekolah TK, 26 sekolah dasar (SD), 14 sekolah menengah pertama (SMP), 6 sekolah menengah atas (SMA), 4 sekolah kejuruan (SMK), 4 madrasah ibtidaiyah (MI), 5 madrasah tsanawiyah (MTs), dan 2 madrasah aliyah (MA). Fasilitas kesehatan adanya 2 puskesmas, 5 pusku, 4 poskesdes, 1 polindes, 5 poliklinik, 5 praktek dokter, 42 praktek bidan, 56 posyandu, 2 apotik, 15 toko obat, dan didukung oleh 6 orang dokter umum, 3 orang dokter gigi, 42 orang bidan, 2

orang apoteker, dan adanya klinik KB. Sedangkan sarana ibadah yang ada di Kecamatan Pinggir adalah 57 masjid, 25 surau/musholla, dan 71 gereja.

Kecamatan Pinggir memiliki beberapa potensi, di antaranya adalah potensi pertanian, potensi perkebunan, dan potensi perikanan. Potensi pertanian dibagi menjadi pertanian tanaman pangan, pertanian sayuran, dan pertanian buah-buahan. Potensi pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pinggir adalah padi sawah, jagung, dan ubi kayu. Potensi pertanian sayurannya adalah sayur bayam, sayur kangkung, terong, kacang panjang, cabe besar, dan cabe rawit. Sedangkan potensi pertanian buah-buahannya adalah semangka.

Potensi perkebunan di Kecamatan Pinggir meliputi karet, kelapa sawit, kelapa, dan pinang. Untuk kelapa sawit, kelapa, dan pinang terdapat atau ditanam di seluruh wilayah desa/kelurahan di Kecamatan Pinggir. Kemudian potensi perikanan adalah ikan budidaya kolam, dimana seluruh desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Pinggir memiliki budidaya ikan kolam.

Fasilitas lainnya yang ada di Kecamatan Pinggir adalah adanya 9 pasar yang tersebar pada enam desa dan dua kelurahan dari total 10 wilayah desa/kelurahan, dimana di Desa Muara Basung terdapat 2 pasar, dan Desa Semunai dan Desa Pangkalan Bunut tidak terdapat pasar. Namun seluruh wilayah desa/kelurahan didukung oleh toko/warung kelontong, warung makanan dan minuman, dan adanya 45 restoran/rumah makan yang tersebar pada 8 desa/kelurahan.

C. Desa Semunai

Desa Semunai adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Tipologi dari Desa Semunai adalah perkebunan, dimana luas seluruh wilayahnya adalah 22.000 Ha. Wilayah Desa Semunai berbatasan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Titian Atui;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Basung;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Balai Raja dan Desa Pinggir;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai.

Berikut susunan dan jabatan pemerintah desa di Desa Semunai Tahun 2018.

Tabel IV.3 Daftar Susunan Pemerintah Desa di Desa Semunai pada Tahun 2018

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Umar B
2	Sekretaris Desa	Baharuddin
3	Kaur Pemerintahan	Alizhar ML
4	Kaur Pembangunan	Asnawi TB
5	Kaur Umum	Dedi Demudy
6	Kaur Keuangan	Lena Wati
7	Kaur Kesra	Arie Arnanda
8	Kepala Dusun I	Hendri
9	Kepala Dusun II	Irmaldi
10	Kepala Dusun III	Poso Dalimunte
11	Staf Administrasi Desa	Novirina Susila

No.	Jabatan	Nama
12	Staf Kesra Desa	Reny Asriyanti
13	Staf Pelayanan Desa	Anisa Rahalim
14	Staf Ekonomi Desa	Dasrul B

Terdapat 14 (empat belas) jenis jabatan di Desa Semunai, yaitu satu orang kepala desa dan sekretaris, terdapat 4 orang kepala urusan (Kaur), terdapat 3 Kepala Dusun (Kadus), dan terdapat 4 orang staf. Seluruh jenis jabatan masing-masing dijabat oleh satu orang. Sedangkan susunan di BPD adalah sebagai berikut.

Tabel IV.4 Daftar Susunan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Semunai pada Tahun 2018

No.	Jabatan	Nama
1	Ketua	Roni Hutasoit
2	Wakil Ketua	Imusri ML
3	Sekretaris	Masita, S.Pd.
4	Seksi Pemerintahan	Marsionton Sitanggung
5	Seksi Perekonomian	Yuyun Marni
6	Seksi Pembangunan	Tombang Sianipar
7	Anggota	Indra L
8	Anggota	Zulfikar BP
9	Anggota	Liliani

Terdapat 7 (tujuh) jenis struktur BPD, yaitu yang tertinggi adalah satu orang ketua dan dibantu oleh satu orang wakil, kemudian terdapat satu orang sekretaris di bawah ketua dan wakil ketua, di bawah sekretaris terdapat tiga seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi perekonomian, dan seksi pembangunan.

Masing-masing seksi dipegang oleh satu orang, sedangkan sisanya adalah anggota BPD.

Kemudian jumlah penduduk Desa Semunai adalah 6.135 jiwa atau terdapat 1.701 Kepala Keluarga (KK). Penduduk Desa Semunai terdiri dari 3.151 laki-laki, dan 2.984 perempuan. Dimana 41,22% penduduknya berusia 0 – 19 tahun (2529 orang). Sebagian besa penduduknya adalah suku Batak (2.619 orang), diikuti oleh suku Jawa sebanyak 1.033 orang, dan suku Melayu sebanyak 879 orang.

Ditinjau dari sarana prasarana pendidikan yang dimiliki oleh Desa Semunai, terdapat 1 perpustakaan desa, 2 gedung sekolah TK, 2 gedung sekolah PAUD, 1 gedung sekolah SD, 1 gedung sekolah MI, 1 gedung sekolah MDA, dan 1 gedung sekolah MTs. Tidak ada gedung sekolah SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Namun masyarakat Desa Semunai juga memiliki penduduk dengan lulusan pendidikan tinggi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Semunai Tahun 2018

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	623 orang
2	Sekolah Dasar (SD) sederajat	1.128 orang
3	SMP sederajat	826 orang
4	SMA sederajat	487 orang
5	Pendidikan Keagamaan	16 orang
6	Akademi / D1 – D3	7 orang
7	Sarjana	13 orang

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
8	Pascasarjana	2 orang
9	Tidak Lulus	2.247 orang
10	Tidak Bersekolah	556 orang

Penduduk Desa Semunai yang menyelesaikan pendidikan dasar (minimal SMP sederajat / 9 tahun) kurang lebih hanya 1.344 orang. Terdapat 1.751 orang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, terdapat 2.247 orang tidak lulus sekolah atau pernah bersekolah tetapi tidak tuntas menyelesaikan jenjang pendidikannya, dan terdapat 556 orang yang tidak bersekolah atau tidak pernah merasakan pendidikan di sekolah sama sekali hingga tahun 2018.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat 45,69% penduduk Desa Semunai yang sama sekali tidak memiliki ijazah pendidikan, 42,00% penduduknya masih berijazah pendidikan dasar atau paling tinggi ijazah SMP. Sisanya 7,94% telah memiliki ijazah SMA sederajat, dan hanya 0,36% penduduknya yang berpendidikan tinggi. Dengan demikian, terdapat 87,69% penduduk Desa Semunai masih berpendidikan rendah pada Tahun 2018. Namun jumlahnya dapat berkurang, karena sebagian besar penduduknya masih menjalankan pendidikan dasar hingga tahun 2018.

Kemudian mengenai mata pencaharian atau pekerjaan warga masyarakat Desa Semunai tersebar atau terdapat dalam beberapa bidang, seperti karyawan, petani, tukang, peternak, pengrajin, pensiunan. Lebih jelas

mengenai jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencahariannya di Desa Semunai Tahun 2018

No.	Mata Pencahrian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5 orang
2	TNI / Polri	8 orang
3	Karyawan Swasta	262 orang
4	Petani	552 orang
5	Tukang	30 orang
6	Peternak	35 orang
7	Pengrajin	6 orang
8	Pensiunan	2 orang

Melalui tabel tersebut, hanya 900 orang yang terdata memiliki pekerjaan / sudah bekerja atau memiliki penghasilan. Dimana sumber penghasilan atau mata pencaharian penduduk Desa Semunai tersebar dalam 8 jenis mata pencaharian. Sebagian besar penduduknya adalah petani, yaitu 552 orang atau 61,33% dari total penduduk yang berpenghasilan. Kemudian diikuti oleh karyawan swasta sebanyak 262 orang, peternak 35 orang, tukang bangunan 30 orang, 8 orang berprofesi sebagai TNI / Polri, 6 orang pengrajin, 5 orang merupakan PNS, dan 2 orang lainnya adalah pensiunan PNS. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran di Desa Semunai hanya 127 orang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis khususnya pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik itu pembangunan sarana prasarana perdesaan; pembangunan bidang pendidikan; dan pembangunan bidang kesehatan. Dimana upaya mendorong partisipasi masyarakat tersebut termasuk ke dalam tugas kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (3) Poin c) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis, bahwa pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan adalah pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan

Kuesioner tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan terdiri dari 15 (lima belas) item pertanyaan / pernyataan. Item-item tersebut diberikan tiga pilihan jawaban, dimana jawaban 'a' diberikan skor 3, jawaban 'b' diberikan skor 2, dan jawaban

'c' diberikan skor 1. Melalui hasil jawaban 43 responden penelitian, diperoleh hasilnya seperti tabel berikut.

Tabel V.1 Jawaban Responden terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan

No.	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Pembangunan sarana prasarana perdesaan selalu diketahui sebelum pembangunan dilaksanakan	-	43 (100%)	-	43 (100%)
2	Informasi terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan hanya diketahui setelah pembangunan itu dilaksanakan	-	34 (79,07%)	9 (20,93%)	43 (100%)
3	Selalu diberikan informasi mengenai akan adanya pembangunan sarana prasarana perdesaan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	-	21 (48,84%)	22 (51,16%)	43 (100%)
4	Mengetahui Informasi terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan hanya karena inisiatif diri sendiri	-	36 (83,72%)	7 (16,28%)	43 (100%)
5	Adanya pemberitahuan langsung terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan oleh Pemerintahan Desa atau jajarannya (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD, RW, atau RT)	11 (25,58%)	32 (74,42%)	-	43 (100%)

No.	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
6	Pemerintah Desa pernah menyelenggarakan kegiatan atau penyuluhan untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan	8 (18,60%)	19 (44,19%)	16 (37,21%)	43 (100%)
7	Pemerintah Desa selalu memberikan motivasi secara langsung kepada masyarakat khususnya pembangunan sarana prasarana perdesaan	-	22 (51,16%)	21 (48,84%)	43 (100%)
8	Pemerintah Desa tidak pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan atau memotivasi masyarakat khususnya pembangunan sarana prasarana perdesaan	10 (23,26%)	33 (76,74%)	-	43 (100%)
9	Ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan karena dorongan Pemerintah Desa	10 (23,26%)	27 (62,79%)	6 (13,95%)	43 (100%)
10	Ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan karena inisiatif diri sendiri	18 (41,86%)	25 (58,14%)	-	43 (100%)
11	Pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, baik itu pendanaan, tenaga, atau pemikiran	-	19 (44,19%)	24 (55,81%)	43 (100%)

No.	Pertanyaan/Pernyataan tentang	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
12	Pemerintah Desa tidak pernah mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan	14 (32,56%)	29 (67,44%)	-	43 (100%)
13	Selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan, baik itu pendanaan, tenaga, atau pemikiran	12 (27,91%)	31 (72,09%)	-	43 (100%)
14	Pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan berupa pendanaan, tenaga, atau pemikiran	16 (37,21%)	27 (62,79%)	-	43 (100%)
15	Tidak mau tahu tentang pembangunan sarana prasarana perdesaan	25 (58,14%)	18 (41,86%)	-	43 (100%)
Jumlah		124	416	105	645
Total Skor		372	832	105	1309
Rata-rata (%)		8 (19,22%)	28 (64,50%)	7 (16,28%)	43 (100%)
Kategori Pengukuran		Cukup Berperan			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan hasil jawaban respon atau masyarakat Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tersebut, dapat diketahui peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan di Desa Semunai dari total skor jawabannya, yaitu 1309 atau berada pada interval 1.075 – 1.504 dengan kategori cukup berperan. Dengan demikian, kepala desa cukup berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana

perdesaan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019.

Mendorong partisipasi masyarakat dilakukan dengan memberikan informasi terkait pembangunan, melakukan pembinaan kepada masyarakat agar terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta rencana dan upaya instruksi kepala desa agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan dengan baik dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait bentuk informasi pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan informasi pembangunan bidang kesehatan kepada masyarakat, diketahui bahwa:

Informasi mengenai pembangunan itu berbentuk surat desa. Kalau ke masyarakat biasanya berbentuk undangan dan pengumuman-pengumuman yang ditempel di kantor desa, di pos ronda atau di tempat-tempat kebanyakan warga berkumpul. Bisa juga pemberitahuan langsung oleh kepala dusun, RT/RW, atau tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat. Tergantung partisipasi apa yang diinginkan oleh pemerintah desa, dan tergantung jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Kalau memang partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan, maka akan melibatkan berbagai tokoh, termasuk LSM, pemuda, tokoh perempuan dan lain sebagainya. Kalau tingkat partisipasi itu masih bisa diatasi sebagian, maka hanya dilakukan melalui undangan dan pengumuman saja (Hasil Wawancara Tanggal 27 Januari 2019)

Dikatakan bahwa terdapat informasi yang disebarkan kepada masyarakat terkait adanya pembangunan, baik itu pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan maupun pembangunan bidang kesehatan. Informasi yang disebarkan dan diberikan

berupa surat desa, undangan, dan pengumuman tertulis. Menurut pihak LKD yang diwakilkan oleh sekretarisnya, bahwa:

Kepala desa sebagai eksekutor tertinggi di pemerintah desa tentunya memiliki kewenangan tertinggi, termasuk memiliki peranan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peraturan terkait tupoksi atau peranan Kepala Desa juga diatur dalam undang-undang, termasuk peranan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kalau mengenai informasi pembangunan tentunya ada pemberitahuan, karena kaur itu bekerja atas perintah kepala desa, dan diketahui oleh kepala desa. Sekretaris juga bekerja diketahui oleh kepala desa atau atas sepengetahuan kepala desa. Jadi, apabila ada informasi ke masyarakat tentunya sudah diketahui oleh kepala desa, dan bisa saja perintah langsung kepala desa kepada jajarannya (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2019)

Dikatan oleh sekretaris LKD, bahwa terdapat informasi pembangunan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Karena mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah termasuk peranan kepala desa yang tercantum dalam undang-undang. Menurut pihak LKD yang diwakilkan oleh wakil ketuanya, bahwa:

Segala bentuk pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis melewati berbagai tahapan. Awalnya itu dimulai dari kegiatan musrenbang desa. Kegiatan itu melibatkan masyarakat, perwakilan LSM, melibatkan tokoh-tokoh yang ada di desa, baik itu tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Juga perwakilan masyarakat seperti RT/RW untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan. Nah, musrenbang desa ini adalah salah satu upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Hasil Wawancara Tanggal 21 Januari 2019)

Bukti adanya pemberian informasi terkait pembangunan kepada masyarakat Desa Semunai diketahui adanya undangan kepada masyarakat untuk menghadiri dan mengikuti musyawarah pembangunan desa

(Musrenbangdes). Dimana tujuannya agar masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam hal pembangunan, tentunya terkait pembangunan sarana prasarana, bidang pendidikan, maupun kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kantor Desa Semunai, diperoleh bahwa masih terdapat arsip surat pemberitahuan No: /PEM/M/.../2019/410 yang berisikan akan diselenggarakannya pembangunan sarana prasarana perdesaan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Bukti lainnya yang didapat adalah adanya undangan gotong royong oleh RT 11/RW 02, dan undang gotong royong RT 07 / RW 01. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan kedua RT tersebut, diketahui bahwa kedua undangan adalah undangan gotong royong pembangunan sarana prasarana perdesaan. Selain itu, hasil observasi penulis lakukan secara langsung di lapangan adalah cukup banyaknya masyarakat yang ikut gotong royong dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan di Desa Semunai.

Melalui beberapa hasil penelitian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Desa Semunai sudah memberikan informasi terkait akan diselenggarakannya pembangunan sarana prasarana perdesaan. Kepala Desa dapat dikatakan cukup berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan. Hal itu terlihat dari cukup banyaknya masyarakat yang ikut terlibat dalam gotong royong membangun sarana prasarana perdesaan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Pelalawan.

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pendidikan

Pertanyaan/ Pernyataan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan juga terdiri dari 15 item dengan tiga pilihan jawaban. Pertanyaan yang diberikan juga serupa, tetapi disesuaikan dengan pembangunan bidang pendidikan. Berdasarkan hasil jawaban seluruh responden penelitian, diperoleh hasil rekapitulasinya seperti tabel berikut.

Tabel V.2 Jawaban Responden terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pendidikan

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Pembangunan bidang pendidikan selalu diketahui sebelum pembangunan dilaksanakan	-	25 (58,14%)	18 (41,86%)	43 (100%)
2	Informasi terkait pembangunan bidang pendidikan hanya diketahui setelah pembangunan itu dilaksanakan	-	32 (74,42%)	11 (25,58%)	43 (100%)
3	Selalu diberikan informasi mengenai akan adanya pembangunan bidang pendidikan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	-	27 (62,79%)	16 (37,21%)	43 (100%)
4	Mengetahui Informasi terkait pembangunan bidang pendidikan hanya karena inisiatif diri sendiri	-	26 (60,47%)	17 (39,53%)	43 (100%)

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
5	Adanya pemberitahuan langsung terkait pembangunan bidang pendidikan oleh Pemerintahan Desa atau jajarannya (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD, RW, atau RT)	-	29 (67,44%)	14 (32,56%)	43 (100%)
6	Pemerintah Desa pernah menyelenggarakan kegiatan atau penyuluhan untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan	-	27 (62,79%)	16 (37,21%)	43 (100%)
7	Pemerintah Desa selalu memberikan motivasi secara langsung kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan	-	29 (67,44%)	14 (32,56%)	43 (100%)
8	Pemerintah Desa tidak pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan atau memotivasi masyarakat khususnya bidang pendidikan	-	23 (53,49%)	20 (46,51%)	43 (100%)
9	Ikut berpartisipasi dalam pembangunan bidang pendidikan karena dorongan Pemerintah Desa	-	20 (46,51%)	23 (53,49%)	43 (100%)
10	Ikut berpartisipasi dalam pembangunan bidang pendidikan karena inisiatif diri sendiri	-	20 (46,51%)	23 (53,49%)	43 (100%)

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
11	Pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, baik itu pendanaan, tenaga, atau pemikiran	-	25 (58,14%)	18 (41,86%)	43 (100%)
12	Pemerintah Desa tidak pernah mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan	-	18 (41,86%)	25 (58,14%)	43 (100%)
13	Selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, baik itu pendanaan, tenaga, atau pemikiran	-	23 (53,49%)	20 (46,51%)	43 (100%)
14	Pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan berupa pendanaan, tenaga, atau pemikiran	-	25 (58,14%)	18 (41,86%)	43 (100%)
15	Tidak mau tahu tentang pembangunan bidang pendidikan	-	24 (55,81%)	19 (44,19%)	43 (100%)
Jumlah		-	373	272	645
Total Skor		-	746	272	1018
Rata-rata (%)		-	25 (57,83%)	18 (42,17%)	43 (100%)
Kategori Pengukuran		Kurang Berperan			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Melalui tabel V.2, diketahui total skor jawaban terkait peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang pendidikan di Desa Semunai sebesar 1018, dimana skor tersebut berada

dalam interval 645 – 1.074 atau dengan kategori kurang berperan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepala desa kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang pendidikan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019.

Melalui hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait bentuk pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan, bidang pendidikan, dan partisipasi pembangunan bidang kesehatan, disebutkan bahwa:

Pembinaan itu tidak dapat optimal kalau hanya sekali pelaksanaannya. Harus terjadwal, dan diikuti dengan baik oleh masyarakat banyak. Tidak mudah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, apalagi partisipasi itu berkaitan dengan faktor diri sendiri dan faktor dorongan dari luar diri masyarakat. Percuma saja pemerintah membina, tetapi diri individu masyarakatnya sendiri tidak ada kesadaran. Kalau bentuknya paling penyuluhan aja, kenapa masyarakat perlu terlibat, apa keuntungannya bagi masyarakat, bagaimana caranya terlibat, apa yang harus dilakukan masyarakat, dan banyak hal lainnya. Intruksi yang diberikan meminta sekretaris bersama kaur terkait agar bekerjasama dengan BPD untuk memberikan penyuluhan (Hasil Wawancara Tanggal 27 Januari 2019)

Bentuk pembinaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Semunai adalah melalui penyuluhan. Hanya saja penyuluhan tidak dilakukan secara berkala atau terprogram. Tetapi hanya sekedar melaksanakan tugas pemberitahuan kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pembangunan di desa. Kemudian sekretaris LKD Desa Semunai mengatakan bahwa:

Seperti yang saya katakan, peranan kepala desa itu sudah jelas dan ada undang-undangnya (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2019)

Tidak disebutkan bentuk pembinaan yang direncanakan dan diinstruksikan oleh Kepala Desa kepada jajarannya agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, tetapi disebutkan peranan kepala desa sudah jelas tercantum dalam undang-undang, dan tidak diketahui undang-undang yang dimaksudkannya tersebut. Sedangkan menurut pihak Ketua LKD Desa Semunai, bahwa:

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa dalam Kabupaten Bengkalis. Dalam pasal enamnya disebutkan kalau tugas kepala desa salah satunya itu pembinaan masyarakat, salah satu bentuk pembinaan masyarakat itu adalah partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu harus dibina oleh pemerintah desa, termasuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Hasil Wawancara Tanggal 21 Januari 2019)

Ketua LKD menyatakan peran kepala desa terdapat dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa dalam Kabupaten Bengkalis, dimana salah satu tugas kepala desa dalam pasal 6 disebutkan sebagai pembinaan masyarakat. Salah satu bentuk tugas pembinaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi dalam pembangunan. Jadi, kepala desa harus berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik itu pembangunan sarana

parasarana perdesaaa, pembangunan bidang pendidikan, maupun pembangunan bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, diperoleh bahwa masih terdapat arsip surat pemberitahuan No: / PEM / SM / / 2019 / 410 di Kantor Desa Semunai. Surat pemberitahuan tersebut berisikan akan diselenggarakannya pembangunan gedung perpustakaan di Dusun I Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selain itu, terdapat bukti tempelan kertas pengumuman di Pos Ronda Dusun Pasir Putih. Pengumuman tersebut berisikan pemberitahuan untuk melakukan gotong royong dalam rangka membersihkan lahan yang akan dibangun taman bacaan masyarakat di Dusun II.

Melalui hasil kuesioner/angket penelitian, wawancara penelitian, dan hasil observasi, diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Desa Semunai Kecamatan Pinggir telah berperan dalam memberikan informasi akan dilaksanakannya pembangunan bidang kesehatan, dalam hal ini terkait informasi akan dibangunnya perpustakaan dan taman bacaan masyarakat di dusun yang berbeda. Namun tidak ada pembinaan dan upaya yang dilakukan Kepala Desa agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan. Dengan demikian dapat dikatakan Kepala Desa kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan di Desa Semunai. Karena masyarakat hanya membersihkan lahan, tidak berpartisipasi dalam

membangunan perpustakaan dan taman bacaan, baik itu partisipasi uang, tenaga dan pikiran, dan kebutuhan lainnya.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan

Pertanyaan/ Pernyataan terkait peran kepala desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan juga terdiri dari 15 item dengan pilihan jawaban yang sama, perbedaan pertanyaan hanya pada bidang pembangunannya. Sebagaimana jawaban kuesioner terkait pembangunan bidang pendidikan, jawaban kuesioner bidang kesehatan ini juga tidak diperoleh jawaban skor 3, atau pilihan jawaban 'a'. Berikut jawaban rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel V.3 di bawah ini.

Tabel V.3 Jawaban Responden terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
1	Pembangunan bidang kesehatan selalu diketahui sebelum pembangunan dilaksanakan	-	29 (67,44%)	14 (32,56%)	43 (100%)
2	Informasi terkait pembangunan bidang kesehatan hanya diketahui setelah pembangunan itu dilaksanakan	-	24 (55,81%)	19 (44,19%)	43 (100%)
3	Selalu diberikan informasi mengenai akan adanya pembangunan bidang kesehatan di Desa	-	26 (60,47%)	17 (39,53%)	43 (100%)

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis				
4	Mengetahui Informasi terkait pembangunan bidang kesehatan hanya karena inisiatif diri sendiri	-	23 (53,49%)	20 (46,51%)	43 (100%)
5	Adanya pemberitahuan langsung terkait pembangunan bidang kesehatan oleh Pemerintahan Desa atau jajarannya (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, BPD, RW, atau RT)	-	30 (69,77%)	13 (30,23%)	43 (100%)
6	Pemerintah Desa pernah menyelenggarakan kegiatan atau penyuluhan untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan	-	16 (37,21%)	27 (62,79%)	43 (100%)
7	Pemerintah Desa selalu memberikan motivasi secara langsung kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan	-	19 (44,19%)	24 (55,81%)	43 (100%)
8	Pemerintah Desa tidak pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan atau memotivasi masyarakat khususnya bidang kesehatan	-	17 (39,53%)	26 (60,47%)	43 (100%)
9	Ikut berpartisipasi dalam pembangunan bidang kesehatan karena dorongan	-	18 (41,86%)	25 (58,14%)	43 (100%)

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Jumlah (%)			Jumlah
		3	2	1	
	Pemerintah Desa				
10	Ikut berpartisipasi dalam pembangunan bidang kesehatan karena inisiatif diri sendiri	-	19 (44,19%)	24 (55,81%)	43 (100%)
11	Pemerintah Desa selalu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, baik itu pendanaan, tenaga, atau pemikiran	-	18 (41,86%)	25 (58,14%)	43 (100%)
12	Pemerintah Desa tidak pernah mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan	-	21 (48,84%)	22 (51,16%)	43 (100%)
13	Selalu terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, baik itu pendanaan, tenaga, atau pemikiran	-	20 (46,51%)	23 (53,49%)	43 (100%)
14	Pernah terlibat dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan berupa pendanaan, tenaga, atau pemikiran	-	20 (46,51%)	23 (53,49%)	43 (100%)
15	Tidak mau tahu tentang pembangunan bidang kesehatan	-	18 (41,86%)	25 (58,14%)	43 (100%)
Jumlah		-	318	327	645
Total Skor		-	636	327	963
Rata-rata (%)		-	21 (49,30%)	22 (50,70%)	43 (100%)
Kategori Pengukuran		Kurang Berperan			

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel V.3, diketahui total skor terkait peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang kesehatan di Desa Semunai adalah 963, dimana skor tersebut berada dalam interval 645 – 1.074 atau dengan kategori kurang berperan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepala desa kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang kesehatan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait bentuk rencana dan upaya instruksi Kepala Desa kepada jajarannya agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan, berpartisipasi dalam pembangunan bidang pendidikan, dan berpartisipasi dalam pembangunan bidang kesehatan, dikatakan bahwa:

Rencananya tercipta partisipasi masyarakat yang baik, tentunya instruksi untuk membentuk tim yang memberikan penyuluhan agar ikut aktif berperan atau berpartisipasi dalam pembangunan, baik itu pembangunan sarana prasarana, pendidikan, dan kesehatan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Hasil Wawancara Tanggal 27 Januari 2019)

Instruksi yang diberikan kepala desa kepada jajarannya agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan, bidang pendidikan, dan berpartisipasi dalam pembangunan bidang kesehatan di Desa Semunai Bengkalis adalah dengan membentuk tim penyuluhan. Dimana tim tersebut bertujuan untuk memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, tentunya untuk meningkatkan

kesadaran, motivasi, dan minat siswa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian menurut sekretaris LKD dikatakan bahwa:

Tentunya kepala desa dapat membuat peraturan desa bersama BPD agar dapat membuat suatu program yang selalu dijalankan oleh jajarannya. Misalnya adanya gotong royong setiap adanya pembangunan, selalu mengundang masyarakat untuk ikut dalam musrenbang desa, memberikan informasi terkait pembangunan dan pentingnya pembangunan. Kepala desa juga dapat membentuk tim yang dapat menggerakkan masyarakat, dapat memotivasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa (Hasil Wawancara Tanggal 16 Januari 2019)

Dikatakan bahwa kepala desa dapat memberikan instruksi kepada jajaran atau bawahannya agar menjalankan suatu program yang telah dibuatnya, termasuk program yang dapat melibatkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Seperti melibatkan jajarannya untuk menghimbau dan mengajak masyarakat untuk bergotong royong, mengundang masyarakat untuk ikut hadir dalam kegiatan musrenbang desa, dan lain sebagainya. Tujuan adanya instruksi kepala desa kepada jajarannya adalah agar dapat dibentuknya tim yang dapat menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk aktif dalam pembangunan desa, baik itu pembangunan sarana prasarana perdesaan, bidang pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan menurut wakil ketua LKD Desa Semunai, dikatakan bahwa:

Kepala desa tentunya harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan sederhananya dapat dilakukan dengan penyuluhan, atau dengan pendekatan-pendekatan melalui para tokoh maupun RT/RW setempat. Intinya kalau ada keuntungan bagi masyarakat secara nyata, tentunya masyarakat akan ikut berpartisipasi. Strategi-strategi itu nanti tergantung kepala desanya mau arahnya seperti apa. Yang jelas

upaya melibatkan partisipasi masyarakat itu adalah tugas kepala desa, dan mutlak dilaksanakan. Mau bidang apa saja, apakah partisipasi pembangunan sarana prasarana perdesaan, sarana kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya (Hasil Wawancara Tanggal 21 Januari 2019)

Kepala desa harus memiliki rencana dan upaya untuk meningkatkan partisipasi atau melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, baik itu partisipasi pada bidang pembangunan sarana prasarana perdesaan, bidang pendidikan, dan pembangunan bidang kesehatan. Karena partisipasi masyarakat termasuk ke dalam tugas atau peran kepala desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis. Tentunya harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan atau strategi yang tepat, karena tidak semua masyarakat aktif dan peduli dengan pembangunan yang ada di desa. Namun secara keseluruhan, peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang kesehatan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel V.4 Rekapitulasi Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa)

No.	Indikator	Total Skor	Kategori
1	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan	1309	Cukup Berperan

No.	Indikator	Total Skor	Kategori
2	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Pendidikan	1018	Kurang Berperan
3	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan	963	Kurang Berperan
Total Skor		3290	Cukup Berperan

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020

Peran kepala desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dimana skor terbesar diperoleh dari peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan. Sedangkan skor terkecil terdapat pada peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang kesehatan. Jadi secara keseluruhan atau dari tiga indikator tugas pembangunan tersebut di atas, diperoleh jumlah total skor sebesar 3290 atau berada dalam interval pengukuran 3.225 – 4.514 (cukup berperan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi pada Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa) adalah cukup berperan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, diperoleh bahwa masih terdapat arsip surat pemberitahuan No:/PEM /SM/.... /2019 /410 di Kantor Desa Semunai. Surat pemberitahuan tersebut berisikan akan diselenggarakannya pembangunan posyandu di Dusun II dan Dusun II

Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Namun tidak ditemukan bukti lainnya, masyarakat hanya terlibat dalam membersihkan lahan untuk pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penelitian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Desa kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang kesehatan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Walaupun terdapat surat pemberitahuan, tetapi ditujukan kepada Kepala Dusun, dan tindak lanjutnya hanya gotong royong membersihkan lahan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam membangun posyandu, baik itu keterlibatan dana, maupun tenaga dan pikiran.

B. Pembahasan

Peranan kepala desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan tugas pembangunan telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis. Dimana pelaksanaan pembangunan adalah salah satu tugas kepala desa, lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan oleh kepala desa berbentuk pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.

Peranan kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat termasuk ke dalam tugas kepala desa, yaitu tugas terkait pembinaan masyarakat. Jadi, tugas

kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan juga bagian dari peranan kepala desa. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kepala desa harus berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah memberikan bantuan berupa uang, barang, dan jasa. Jadi, adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berupa adanya pemberian bantuan untuk pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, maupun untuk pembangunan bidang kesehatan.

Peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa, dapat diketahui dari adanya: (1) informasi terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan kepada masyarakat; (2) pembinaan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan; serta (3) melibatkan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.

Informasi diperlukan masyarakat agar mengetahui dan dapat ikut terlibat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya. Tentunya partisipasi

tidak akan terjadi apabila masyarakat tidak mengetahui informasi akan adanya pembangunan, atau tidak adanya pemberitahuan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, informasi terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan harus diinformasikan kepada masyarakat.

Pembinaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga diperlukan. Karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau inisiatif untuk ikut terlibat dalam pembangunan, walaupun sudah mengetahui informasi terkait pembangunan. Banyak faktor yang melandasi hal tersebut, di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait peranannya dalam pembangunan di desa, maupun arti penting berpartisipasi dalam pembangunan di desa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, harus ada tindak lanjut setelah diberikannya informasi terkait pembangunan kepada masyarakat, yaitu adanya pembinaan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.

Melibatkan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan adalah tindakan nyata dari Kepala Desa melalui jajaran dan bawahannya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan, baik itu partisipasi dalam bentuk uang, harta benda, tenaga, maupun keterampilan. Oleh sebab itu, harus ada upaya kepala desa untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai pembangunan desa (pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan pembangunan bidang kesehatan).

Kepala Desa telah memberikan informasi kepada masyarakat terkaitnya pembangunan desa, baik itu berupa surat edaran desa, undang gotong royong, pengumuman, serta melibatkan sebagian masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes. Dimana Musrenbangdes selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya untuk merencanakan dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kepala Desa juga telah memberikan bentuk pembinaan berupa penyuluhan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta adanya melibatkan masyarakat atau adanya upaya agar masyarakat terlibat secara pendanaan, tenaga, harta benda, atau keterampilan/pikiran dalam pembangunan desa. Hal itu diketahui dengan adanya partisipasi tenaga berupa gotong royong dari masyarakat, maupun partisipasi berupa harga benda seperti material bangunan.

Menurut masyarakat, kepala desa Semunai cukup berperan dalam mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Namun kepala desa kurang berperan dalam mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan bidang pendidikan, dan pembangunan bidang kesehatan. Secara keseluruhan, Kepala Desa Semunai cukup berperan dalam pelaksanaan tugas pembangunan di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data sekunder yang dapat diperoleh di lapangan terkait pemberian informasi mengenai pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, atau kesehatan kepada masyarakat, diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Tabel V.5 Data Sekunder Penelitian

No.	Indikator	Item Penilaian	Data Sekunder
1	2	3	4
1	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan	Adanya informasi terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan kepada masyarakat	a. Surat Desa No: / PEM / SM / / 2019 / 410 b. Undangan gotong royong yang dibuat oleh RT 11 / RW 02 dan RT 07 / RW 01 Desa Semunai
2	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan	Adanya informasi terkait pembangunan bidang pendidikan kepada masyarakat	a. Surat Desa No: / PEM / SM / / 2019 / 410 b. Pengumuman untuk gotong royong dalam rangka pembangunan taman bacaan masyarakat
3	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan	Adanya informasi terkait pembangunan bidang kesehatan kepada masyarakat	Surat Desa No: / PEM / SM / / 2019 / 410

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa di Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 adalah cukup berperan. Adapun rincian mengenai peranan Kepala Desa Semunai dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa cukup berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan sarana prasarana perdesaan. Diketahui dari banyaknya masyarakat yang terlibat langsung dalam membangun sarana prasarana perdesaan.
2. Kepala Desa kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang pendidikan.
3. Kepala Desa kurang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat terkait pembangunan bidang kesehatan.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum mendorong partisipasi masyarakat, sebaiknya harus dikaji atau dipertimbangkan berbagai faktor penentu partisipasi, yaitu faktor usia,

jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal dan pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan gotong royong dan pembangunan sarana prasarana perdesaan saja, tetapi termasuk juga pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, harus ada keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan, baik itu berupa partisipasi uang, harta benda, tenaga, atau keterampilan. Misalnya adanya sumbangan buku-buku pada pembangunan bidang pendidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Brodjonegoro, Bambang PS., dkk. 2009. *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Davis, Keith dan Newstrom. 1996. *Perilaku dalam Organisasi*. Edisi Tujuh. Jakarta: Erlangga.
- Keban, T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Linton, Ralph. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Mardikanto, Totok. 2013. *Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 2004. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: BPF.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pramusinto, Agus, dan Purwanto, Erwan Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pratikno. 2007. *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Yogyakarta: Jogja Global Media.
- Rauf, Rahyunir & Maulidiah, Sri. 2015. *Pemerintah Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rianse, Abdi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Robbins, Stephen. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Sastropoetro, Santoso. 2011. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Tidak Diterbitkan.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: PT. Gadjah Mada University.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wasito, Hermawan. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.

Dokumen:

Angell. 2009. Partisipasi. Diunduh dari Jurnal Online Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Praktik.

Joyo, Hami. 2009. Partisipasi. Tidak Diterbitkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Bengkalis No. 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau